

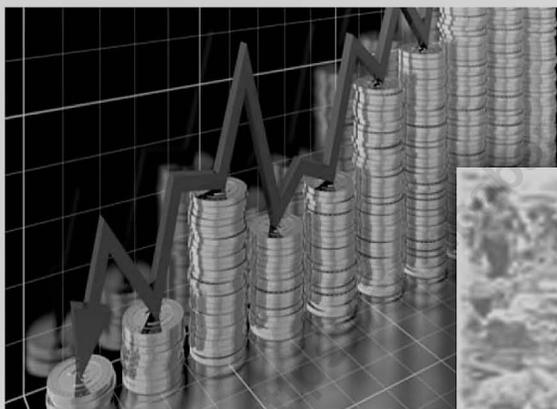
KATALOG BPS: 9302003.5301

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SUMBA BARAT MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2015-2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SUMBA BARAT**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SUMBA BARAT MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2015-2019



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SUMBA BARAT MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2015 – 2019

ISBN : 978-602-6597-87-8

Nomor Publikasi : 53015.010

Katalog BPS : 9302003.5316

Ukuran Buku : 21,59 cm x 27,94 cm

Jumlah Halaman : x + 68

Naskah :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat

Jl. Weekarou, Kecamatan Kota Waikabubak

Telp : 0387 – 21256, Fax : 0387 – 21256

e-mail : bps5301@bps.go.id

web : sumbaratkab.bps.go.id

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SUMBA BARAT MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2015 – 2019

Anggota Tim Penyusun :

Pengarah : Ir. Joke Ratna Christina

Editor : Ervina Jayanti Siagian, SST

Penulis : Dyonisius H S Jewaru, SST

Pengolah Data : Dyonisius H S Jewaru, SST

Penyiapan Draft : Dyonisius H S Jewaru, SST

<https://sumbabarakabps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi “Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Barat Menurut pengeluaran Tahun 2015-2019” ini merupakan lanjutan dari publikasi sejenis yang telah diterbitkan pada tahun - tahun sebelumnya. Publikasi ini disusun oleh Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat.

Publikasi ini menyajikan berbagai tabel dasar turunan tentang data pendapatan regional untuk Sumba Barat serta analisis deskriptif tentang perkembangan perekonomian Sumba Barat dalam kurun 2015-2019. Untuk lebih memperjelas berbagai terminologi yang digunakan, disajikan pula konsep, definisi dan metodologi perhitungan yang telah diaplikasikan dalam penyusunan publikasi ini.

Data tiga tahun terakhir yang disajikan dalam publikasi ini masih bersifat sangat sementara. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat sampai dengan batas waktu penerbitan beberapa data masih belum terkumpul secara lengkap. Penyempurnaan dan revisi terhadap data tersebut akan dilakukan pada penerbitan berikutnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan publikasi ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Waikabubak, Mei 2020

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Kabupaten Sumba Barat



Ir. Joke Ratna Christina

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PENJELASAN TEKNIS	ix
I. PENJELASAN UMUM		
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto	1
1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto	2
1.3 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto	3
II. METODE PENGHITUNGAN DAN SUMBER DATA		
2.1 PDRB Menurut pengeluaran	11
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT)	16
2.4 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	19
2.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	21
2.6 Perubahan Inventori	25
2.7 Ekspor dan Impor Barang serta Jasa	28
III. TINJAUAN PEREKONOMIAN MENURUT PDRB PENGELUARAN		
3.1 Komposisi PDRB Pengeluaran	32
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	41
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	44
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	45
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	46
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	47
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa	48
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa	50
IV. ANALISIS STRATEGIS PDRB PENGELUARAN		
4.1 PDRB Nominal	55
4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB	55
4.3 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	57
V. PENUTUP	59
IV. LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB	6
Tabel 1.2	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010	7
Tabel 1.3	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	8
Tabel 3.1	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015 – 2019	33
Tabel 3.2	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015-2019	34
Tabel 3.3	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015-2019	36
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015-2019	38
Tabel 3.5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015-2019	40
Tabel 3.6	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Sumba Barat 2015-2019	42
Tabel 3.7	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Sumba Barat 2015-2019	43
Tabel 3.8	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Sumba Barat 2015-2019	45
Tabel 3.9	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Sumba Barat 2015-2019	47
Tabel 3.10	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Sumba Barat 2015-2019	48
Tabel 3.11	Perkembangan Ekspor Kabupaten Sumba Barat 2015-2019	49
Tabel 3.12	Perkembangan Impor Kabupaten Sumba Barat 2015-2019	51
Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Sumba Barat 2015-2019	55
Tabel 4.2	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Sumba Barat 2015-2019	56
Tabel 4.3	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> , Kabupaten Sumba Barat 2015-2019	58

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 3.1	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015 – 2019	33
Grafik 3.2	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015 – 2019	35
Grafik 3.3	Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015-2019	35
Grafik 3.4	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015-2019	37
Grafik 3.5	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015 – 2019	39
Grafik 3.6	Pertumbuhan Komponen PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015 – 2019	39

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut pengeluaran, 2015-2019 (juta rupiah)	61
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut pengeluaran, 2015-2019 (juta rupiah)	62
Lampiran 3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut pengeluaran, 2015-2019 (persen)	63
Lampiran 4	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nusa Tenggara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut pengeluaran, 2015-2019 (persen)	64
Lampiran 5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut pengeluaran, 2015-2019 (persen)	65
Lampiran 6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut pengeluaran, 2015-2019 (persen)	66
Lampiran 7	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Barat Menurut pengeluaran, 2015-2019 (persen)	67
Lampiran 8	Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumba Barat Menurut pengeluaran, 2015-2019 (persen)	68

<https://sumbabaratkab.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS

1. Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan di sini mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikenal sebagai “Sistem Neraca Nasional”. Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
3. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.
4. Penyajian PDRB menurut pengeluaran dirinci menurut total semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

5. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.
6. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.
7. **Harga Berlaku** adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.
8. **Harga Konstan** adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar.
9. **Tahun Dasar** adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.

Bab I

Penjelasan Umum

<https://sumbabaratkab.bps.go.id>

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Apa yang Dimaksud dengan PDRB?

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

1.3 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Apa yang Dimaksud SNA 2008?

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;

- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index /PPI*);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

- **Konsep dan Cakupan: Perlakuan *Work-in Progress (WIP)* pada *Cultivated Biological Resources (CBR)*:**
Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti : nilai tegakan padi yang belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.
- **Metodologi : Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge (IBSC)* menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)***
.
- **Valuasi : Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (*Basic Price*).**
Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.

¹ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- **Klasifikasi :**

Klasifikasi yang digunakan berdasarkan Internasional Standard Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial.	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge</i> (IBSC) .	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured</i> (FISIM)
3. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian	B. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan	C. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	D. Pengadaan Listrik dan Gas
	E. Pengadaan Air
5. Konstruksi	F. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
7. Pengangkutan dan Komunikasi	H. Transportasi dan Pergudangan
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
8. Keuangan, Real estat, dan jasa perusahaan	J. Informasi dan Komunikasi
	K. Jasa Keuangan
	L. Real Estat
	M,N. Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	P. Jasa Pendidikan
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	R,S,T,U. Jasa Lainnya

Sementara klasifikasi PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan seperti tabel berikut :

Tabel 1.3. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

Bab II

Metode Penghitungan

dan

Sumber Data

<https://sumbabarangkab.go.id>

2.1 PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB yang disajikan menurut pengeluaran dapat memperlihatkan komposisi penggunaan barang dan jasa. Secara umum, dari segi penggunaannya barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai sektor ekonomi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Barang dan jasa yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi yang disebut dengan konsumsi antara (*intermediate consumption*).
2. Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik masyarakat individu maupun lembaga yang disebut konsumsi akhir (*final consumption*) dan investasi. Konsumsi akhir ini mencakup:
 - a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba
 - b. Pengeluaran konsumsi pemerintah
 - c. Pembentukan modal tetap bruto
 - d. Perubahan stok
 - e. Ekspor dan impor

Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir dapat berasal dari produk domestik (wilayah sendiri) maupun impor baik dari luar negeri maupun dari wilayah lain di Indonesia. Secara matematik keadaan ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y + M = C + I + Is + E$$

di mana:

Y	= Produk Domestik Regional Bruto
M	= Impor
C	= Konsumsi Rumah Tangga, Pemerintah dan Lembaga Nirlaba
I	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Is	= Perubahan Stok
E	= Ekpor

Dalam hal ini yang dihitung adalah produk domestik (produk yang ditimbulkan di daerah tersebut), maka persamaan tersebut dapat diturunkan menjadi:

$$Y = C + I + Is + E - M$$

Oleh karena itu, dalam penyajian PDRB menurut pengeluaran dihitung komponen-komponen permintaan akhir.

Penyusunan PDRB menurut komponen penggunaan memiliki peran yang cukup penting, terutama untuk melakukan analisis pola permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu entitas ekonomi. Melalui analisis ini dapat diketahui masing-masing proporsi PDRB yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau investasi. Jika proporsi konsumsi terlalu besar dapat diduga bahwa peningkatan kapasitas perekonomian di wilayah tersebut akan relatif berat, karena sumber daya yang digunakan untuk investasi akan mengecil. Dari analisis ini juga dapat diketahui mengenai 'kebocoran' yang mungkin diderita sebagai akibat besarnya impor untuk memenuhi permintaan yang ada. Informasi ini dapat digunakan untuk memperkaya masukan rumusan kebijakan bagi perencanaan pembangunan.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut :

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun, karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

1. Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
2. Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
3. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
4. Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
5. Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

1. Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
2. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
3. Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
4. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
2. Jumlah penduduk pertengahan tahun,
3. Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
4. Indeks Harga Konsumen (IHK).

Selama ini, penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010. Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun

2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT)

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

Pengeluaran konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) merupakan bagian dari pengeluaran lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan

- Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

Sumber data :

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNPRT).
- Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNPRT adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
- Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.4 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya

tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

Sumber Data :

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan
- b. Data realisasi APBD Tahunan
- c. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Indeks Harga dari BPS.

Metode Penghitungan:

a. PK-P ADHB

Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut :

<p>PK-P ADHB=</p> <p>Output non pasar – penjualan barang dan jasa + output Bank Indonesia</p>
--

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi ADHB, dihitung berdasarkan pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari kabupaten yang bersangkutan.

b. PK-P ADHK

PK-P ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari PDRB komponen Pembentukan Modal Tetap (PMTB) Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan "arus komoditas". Dalam hal ini penyediaan atau "*supply*" dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar

harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADHB atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADHK 2010, maka PMTB ADHB tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADHB maupun ADHK 2010.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK adalah dengan men-*deflate* PMTB ADHB dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB ADHK 2010 dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK 2010 terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB, nilai PMTB ADHK 2010 tersebut di

“reflate”(dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK 2010 di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB ADHK 2010 adalah dengan cara men“deflate” PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADHK 2010 diperoleh dengan men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk ADHK 2010 diperoleh dengan men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHK 2010 diperoleh dengan cara mendeflate nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.6 Perubahan Inventori

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi

pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah

pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”. Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori ADHK 2010, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori ADHK 2010 dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori ADHK 2010 dengan menginflatae perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHK 2010 dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk

periode waktu yang berurutan;

- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.7 Ekspor dan Impor Barang serta Jasa

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut. Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://sumbabaratkab.bps.go.id>

Bab III
Tinjauan Perekonomian
Menurut
PDRB Pengeluaran

<https://sumbabaratkab.go.id>

Perubahan struktur ekonomi Sumba Barat yang dipengaruhi proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2015 s.d 2019, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan antar-regional maupun internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Sumba Barat digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

Sesuai dengan uraian sebelumnya, PDRB dari sisi pengeluaran akan mencakup seluruh produk akhir yang digunakan atau dikonsumsi oleh para konsumen akhir. Dengan kata lain, PDRB dapat pula dipandang sebagai seluruh produk yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir.

Permintaan akhir, yaitu permintaan yang bukan untuk keperluan produksi, pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu permintaan akhir domestik dan permintaan akhir dari luar wilayah. Permintaan akhir domestik terdiri atas konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto. Sedangkan permintaan akhir dari luar wilayah terdiri atas ekspor dan impor. Pada prakteknya, penyediaan produk akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi suatu wilayah seringkali tidak mampu memenuhi seluruh permintaan akhir yang ada. Dalam hal ini maka perlu didatangkan produk akhir dari luar wilayah, yang terdiri dari ekspor dan impor.

Uraian berikut akan memperlihatkan komposisi PDRB pengeluaran di Sumba Barat dan perkembangannya.

3.1 Komposisi PDRB Pengeluaran

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melemah di tahun 2019, perekonomian Kabupaten Sumba Barat periode 2015 - 2019 terus mengalami peningkatan, yakni sebesar 4,80 persen pada tahun 2015 dan terus meningkat hingga mencapai angka 5,12 persen di tahun 2019, dimana pertumbuhan ekonominya *linear* dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai kontributor utama dan terbesar pada perekonomian Kabupaten Sumba Barat, sedangkan dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB menurut pengeluaran.

Pada periode tahun 2015 - 2019 PDRB Kabupaten Sumba Barat atas dasar harga berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 1,64 triliun rupiah pada tahun 2015 dan terus meningkat hingga mencapai hampir 2,33 triliun rupiah pada tahun 2019. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Sumba Barat pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari tabel 3.1 dan grafik 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015 - 2019

Table 3.1. GRDP at current price by Expenditure, Sumba Barat Regency 2015-2019
(Juta Rp/Million Rp)

Komponen Pengeluaran/Expenditure item	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga/Household Consumption	1.342.725,32	1.463.525,12	1.569.743,55	1.657.668,48	1.760.927,83
2. Konsumsi LNPRT/NPISH Consumption	53.742,87	56.500,46	62.549,29	70.014,11	76.915,32
3. Konsumsi Pemerintah/Government Consumption	700.363,78	755.476,22	806.371,63	916.149,62	943.046,45
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/Gross Fixed Capital Formation	514.610,86	693.855,39	761.376,30	817.426,99	856.348,45
5. Perubahan Inventori/Changes of Inventory	75.924,99	30.625,59	36.812,03	44.837,68	52.253,56
6. Ekspor/Export	327.218,00	149.167,98	151.562,56	185.814,92	180.789,52
7. Impor/Import	1.373.584,11	1.321.351,87	1.399.589,97	1.523.032,12	1.535.820,58
PDRB / GRDP	1.641.001,71	1.827.798,88	1.988.825,40	2.168.879,69	2.334.460,55

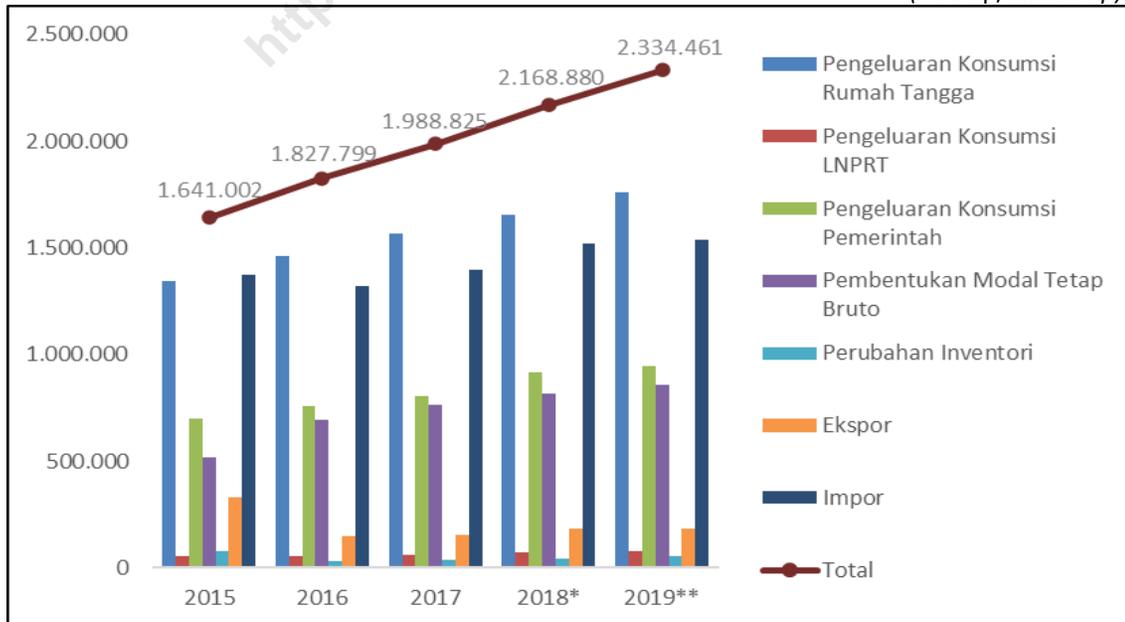
Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Grafik 3.1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015 – 2019

Figure 3.1. GRDP at current price by Expenditure, Sumba Barat Regency 2015-2019
(Juta Rp/Million Rp)



Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Sumba Barat pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015-2019

Table 2. GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Sumba Barat Regency 2015-2019

(Juta Rp/Million Rp)

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	1.052.776,88	1.102.278,77	1.147.921,34	1.196.624,32	1.241.476,70
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	44.333,39	44.712,01	47.597,94	51.760,07	55.082,00
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	557.376,00	558.856,03	571.888,96	612.118,50	624.912,40
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	418.993,00	489.761,06	519.945,77	542.346,36	560.804,19
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	45.200,27	17.534,32	20.281,68	23.693,03	27.084,06
6. Ekspor/ <i>Export</i>	238.789,86	98.068,65	98.144,61	112.472,11	108.981,12
7. Impor/ <i>Import</i>	1.174.149,91	1.068.695,42	1.100.826,94	1.167.870,16	1.176.949,66
PDRB / GRDP	1.183.319,48	1.242.515,43	1.304.953,37	1.371.144,23	1.441.390,81

Keterangan :

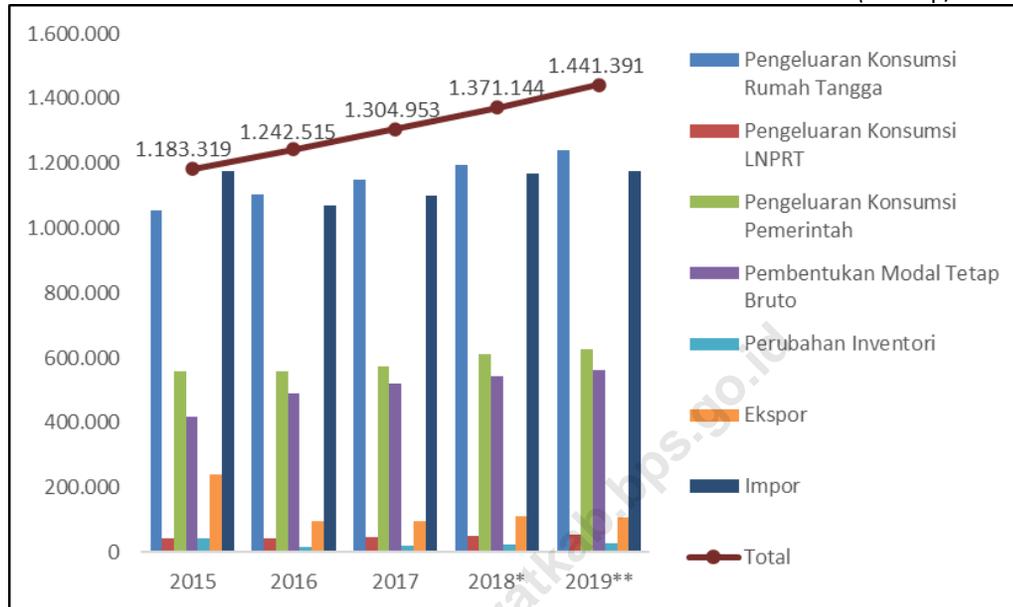
**) Angka Sementara*

****) Angka Sangat Sementara*

Dari tabel 3.2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Sumba Barat terus meningkat dari 1,18 triliun rupiah pada tahun 2015 hingga mencapai 1,44 triliun rupiah pada tahun 2019. Peningkatan ini juga divisualisasikan melalui grafik 3.2 berikut ini:

Grafik 3.2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015 – 2019

Figure 3.2. GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Sumba Barat Regency 2015-2019
(Juta Rp/Million Rp)



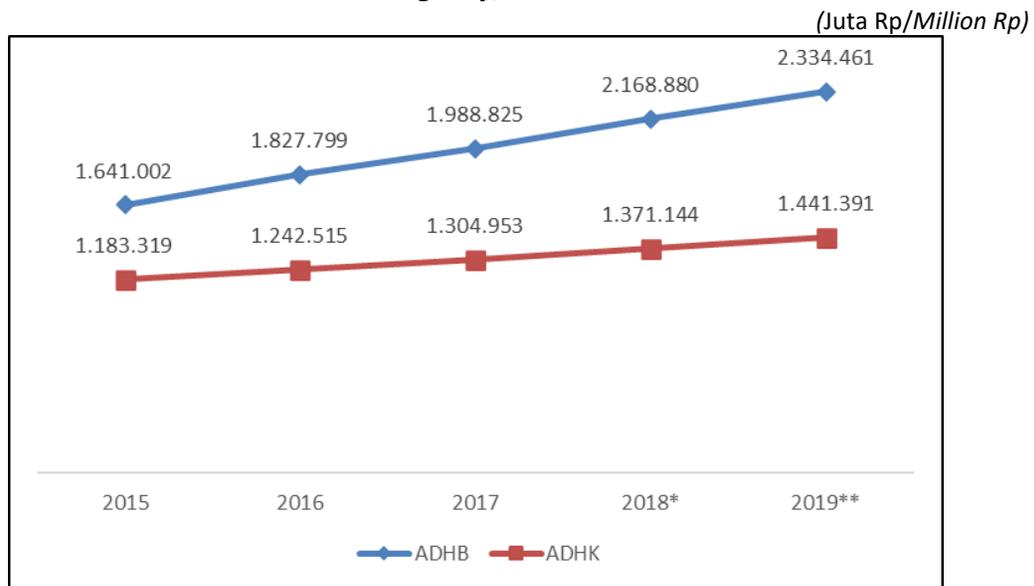
Keterangan :

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Grafik 3.3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015-2019

Figure 3.3. Comparing of GRDP at current price and GRDP at Constant Price 2010, Sumba Barat Regency, 2015-2019



Keterangan :

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Dari grafik 3.3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 3.3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015-2019
Table 3.3. Distribution of GRDP at Current Price by Expenditure, Sumba Barat Regency 2015-2019

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	(%)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	81,82	80,07	78,93	76,43	75,43
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	3,28	3,09	3,15	3,23	3,29
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	42,68	41,33	40,55	42,24	40,40
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	31,36	37,96	38,28	37,69	36,68
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	4,63	1,68	1,85	2,07	2,24
6. Ekspor/ <i>Export</i>	19,94	8,16	7,62	8,57	7,74
7. Impor/ <i>Import</i>	83,70	72,29	70,37	70,22	65,79
PDRB / GRDP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan :

*) Angka Sementara

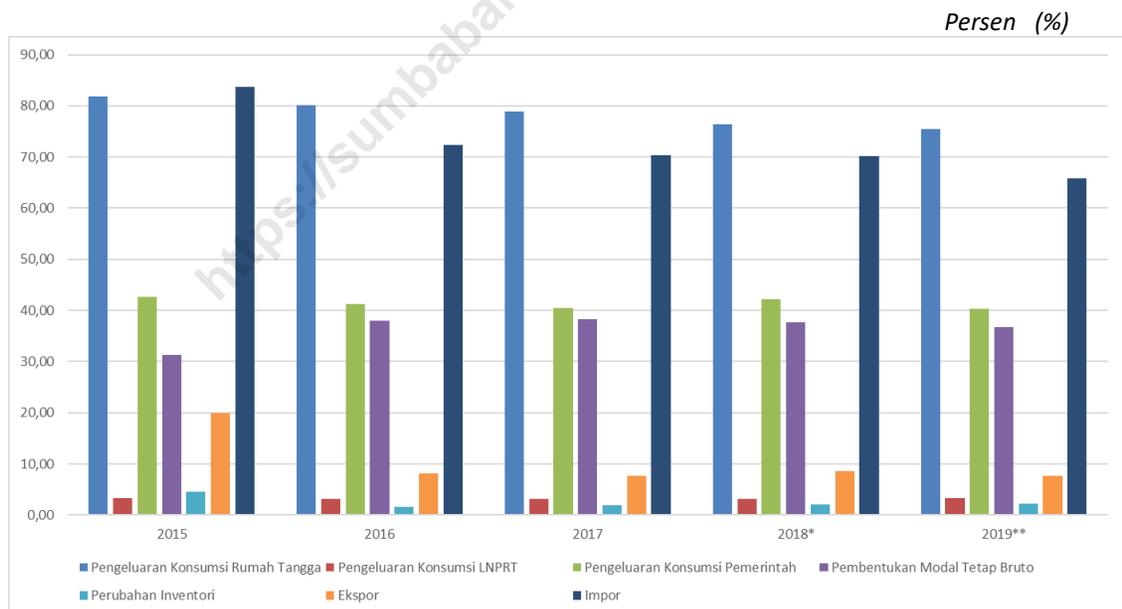
***) Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2015-2019, PDRB Kabupaten Sumba Barat, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT).

Meskipun begitu, distribusi komponen ini terus mengalami penurunan, dari sebesar 81,82 persen di tahun 2015 menjadi 75,43 persen pada tahun 2019. Pengeluaran untuk konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) selama lima tahun terakhir juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 41 persen untuk konsumsi pemerintah dan 36 persen untuk aktivitas PMTB. Di sisi lain, ekspor mampu memberikan kontribusi secara rata-rata sekitar 8 persen pada tahun 2019. Namun, perekonomian di Kabupaten Sumba Barat masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap wilayah lain. Hal ini dapat dilihat dari proporsi impor pada kurun waktu yang sama. Proporsi impor pada PDRB penggunaan cukup besar, yaitu rata-rata mencapai 72 persen selama 5 tahun terakhir.

Grafik 3.4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015-2019
Figure 3.4. Distribution of GRDP at Current Price by Expenditure, Sumba Barat Regency 2015-2019



Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Kontribusi komponen konsumsi LNPRT dan perubahan inventori cenderung kecil, menunjukkan peran kedua komponen dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Pada tahun 2019 konsumsi LNPRT hanya berkontribusi sebesar 3,29 persen sedangkan perubahan inventori berkontribusi sebesar 2,24 persen dari PDRB Kabupaten Sumba Barat.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 3.4 dan grafik 3.5, selama periode tahun 2015-2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat mengalami percepatan, yakni sebesar 4,80 persen (2015); 5,00 persen (2016); 5,03 persen (2017); 5,07 persen (2018); dan 5,12 persen (2019). Sedangkan dari grafik 3.6 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015-2019
Table 3.4. Growth rate of GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Sumba Barat Regency 2015-2019

	(%)				
Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	6,13	4,70	4,14	4,24	3,75
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	5,49	0,85	6,45	8,74	6,42
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	8,35	0,27	2,33	7,03	2,09
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	13,93	16,89	6,16	4,31	3,40
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	-0,09	-61,21	15,67	16,82	14,31
6. Ekspor/ <i>Export</i>	42,72	-58,93	0,08	14,60	-3,10
7. Impor/ <i>Import</i>	17,46	-8,98	3,01	6,09	0,78
PDRB / GRDP	4,80	5,00	5,03	5,07	5,12

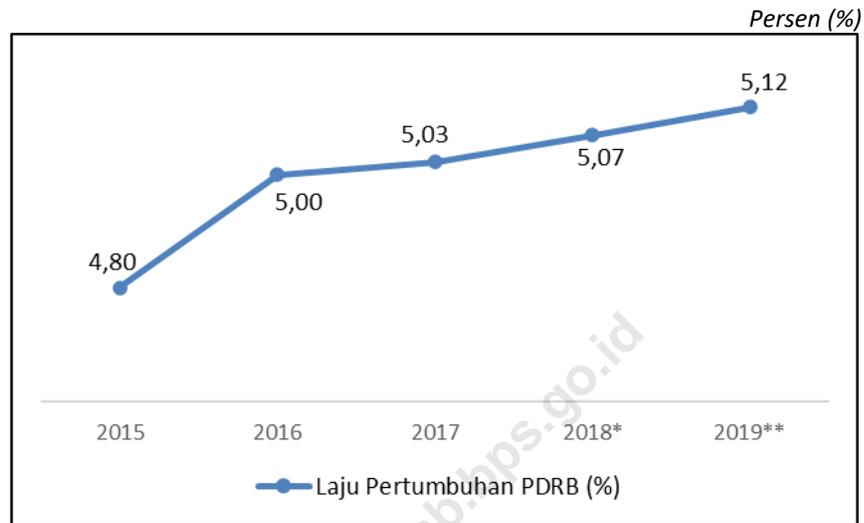
Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Grafik 3.5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015 – 2019

Figure 3.5. Growth rate of GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Sumba Barat Regency 2015-2019



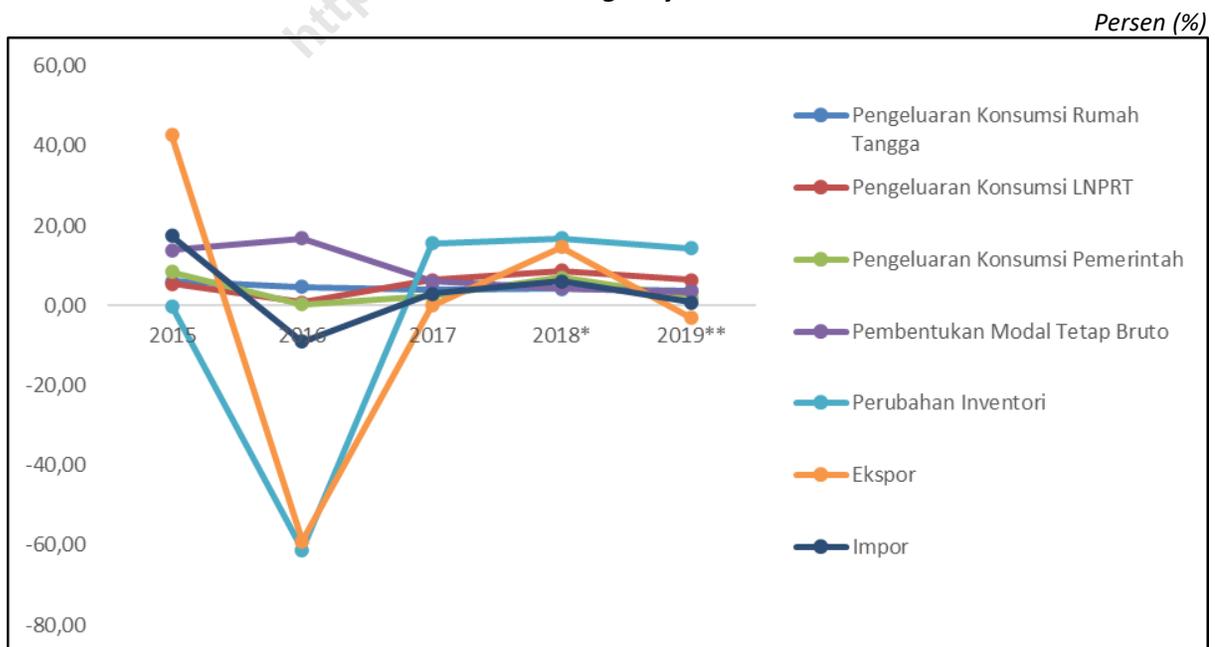
Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Grafik 3.6. Pertumbuhan Komponen PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015 – 2019

Figure 3.6. Growth rate of GRDP component at 2010 Constant Price by Expenditure, Sumba Barat Regency 2015-2019



Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Indeks implisit¹ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 3.5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2015 – 2019, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sumba Barat 2015-2019
Table 3.5. Implicit Indices of GRDP by Expenditure, Sumba Barat Regency 2015-2019

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	(%)				
	2015	2016	2017	2018**	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	127,54	132,77	136,75	138,53	141,84
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	121,22	126,37	131,41	135,27	139,64
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	125,65	135,18	141,00	149,67	150,91
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	122,82	141,67	146,43	150,72	152,70
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	167,97	174,66	181,50	189,24	192,93
6. Ekspor/ <i>Export</i>	137,03	152,11	154,43	165,21	165,89
7. Impor/ <i>Import</i>	116,99	123,64	127,14	130,41	130,49
PDRB / GRDP	138,68	147,10	152,41	158,18	161,96

Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan

¹ Indeks perkembangan

untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Sumba Barat untuk periode 2015 – 2019.

3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Sumba Barat, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Sumba Barat maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data pada table 3.6 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015 – 2019 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami (peningkatan/penurunan) signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.6. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Sumba Barat 2015-2019

Table 3.6. Trend of Using on Final Household Consumption of Sumba Barat Regency 2015—2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Total of Household Consumption</i>					
a. ADHB / <i>Current Prices</i> (Juta Rp/ <i>Million Rp</i>)	1.342.725,32	1.463.525,12	1.569.743,55	1.657.668,48	1.760.927,83
b. ADHK 2010/2010 <i>Constant Prices</i> (Juta Rp/ <i>Million Rp</i>)	1.052.776,88	1.102.278,77	1.147.921,34	1.196.624,32	1.241.476,70
Proporsi terhadap PDRB/ <i>Proportion to GRDP</i> (% ADHB / <i>Current Prices</i>)	81,82	80,07	78,93	76,43	75,43
Rata-rata konsumsi per- Kapita/ <i>Average of per-capita consumption</i> (Ribu Rp/ <i>Thousand Rp</i>)					
a. ADHB / <i>Current Prices</i> (Juta Rp/ <i>Million Rp</i>)	11,01	11,81	12,48	12,96	13,58
b. ADHK 2010/2010 <i>Constant Prices</i> (Juta Rp/ <i>Million Rp</i>)	8,63	8,90	9,13	9,36	9,57
Pertumbuhan/ <i>Growth</i> ²					
a. Total konsumsi RT/ <i>Total of Household Consumption</i>	6,13	4,70	4,14	4,24	3,75
b. Perkapita/ <i>Per capita</i>	-	3,02	2,60	2,53	2,28
Jumlah penduduk/ <i>Number of population (orang/person)</i>	121921	123913	125776	127872	129710
<i>Keterangan :</i>					
*) <i>Angka Sementara</i>					
**) <i>Angka Sangat Sementara</i>					

Selama periode 2015 – 2019 rata-rata pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga dalam PDRB Kabupaten Sumba Barat adalah sebesar 4,59 persen. Selama kurun waktu ini, pertumbuhan penggunaan konsumsi rumah tangga mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2015 pertumbuhannya adalah sebesar 6,13 persen dan turun menjadi 4,70 persen pada tahun 2016 dan 4,14 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018 pertumbuhan komponen ini mengalami percepatan menjadi sebesar 4,24 persen. Namun pada tahun 2019 pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga kembali mengalami perlambatan menjadi 3,75 persen.

² Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB terus menurun, yaitu sebesar 81,82 persen (2015); 80,07 persen (2016); 78,93 persen (2017); 76,43 persen (2018); dan 75,43 persen (2019). Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, kontribusi konsumsi makanan terhadap total konsumsi relative lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi non makanan. Pola proporsi konsumsi tersebut menunjukkan pergeseran yang relatif kecil antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan. Walaupun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat, dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan, dan sebagainya.

3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 3.7 Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Sumba Barat 2015-2019

Table 3.7 Trend of NPISH Final Consumption Expenditure, Sumba Barat Regency 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Juta Rp)	53.742,87	56.500,46	62.549,29	70.014,11	76.915,32
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	44.333,39	44.712,01	47.597,94	51.760,07	55.082,00
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	3,28	3,09	3,15	3,23	3,29
Pertumbuhan (ADHK 2010)	5,49	0,85	6,45	8,74	6,42

Keterangan :

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2015 konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku sebesar 53 miliar rupiah, dan terus mengalami peningkatan hingga 76 miliar rupiah pada tahun 2019. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berturut-turut adalah sebesar 5,49 persen (2015), 0,85 persen (2016), 6,45 persen (2017), 8,74 persen (2018), dan 6,42 persen (2019).

3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 3.8 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Sumba Barat 2015-2019
Table 3.8 Trend of Government Final Consumption Expenditure, Sumba Barat Regency 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Juta Rp)	700.363,78	755.476,22	806.371,63	916.149,62	943.046,45
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	557.376,00	558.856,03	571.888,96	612.118,50	624.912,40
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	42,68	41,33	40,55	42,24	40,40
Pertumbuhan (ADHK 2010)	8,35	0,27	2,33	7,03	2,09

Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 700 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya meningkat menjadi sebesar 755 miliar rupiah (2016), 806 miliar rupiah (2017), 916 miliar rupiah (2018) dan 943 miliar rupiah (2019). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas. Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDB justru mengalami penurunan dari 42,68 persen (tahun 2015) hingga mencapai 40,40 persen (tahun 2019). Komponen konsumsi akhir pemerintah ini merupakan komponen terbesar ketiga dalam struktur PDRB Kabupaten Sumba Barat, atau terbesar kedua setelah pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam komponen pengeluaran konsumsi. Oleh karena proporsinya yang besar dalam struktur PDRB ini, maka komponen pengeluaran konsumsi pemerintah memiliki peranan penting dalam dinamika perekonomian Kabupaten Sumba Barat.

Bila dilihat dari pengeluaran riil, maka konsumsi akhir pemerintah (ADHK 2010) tahun 2015-2019 rata-rata tumbuh sebesar sebesar 4,02 persen per tahun. Pada tahun 2015, konsumsi akhir pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 8,35 persen dan mengalami perlambatan

pertumbuhan pada tahun 2016 menjadi 0,27 persen. Pada tahun 2017 dan 2018, konsumsi riil pemerintah Kabupaten Sumba Barat mengalami percepatan pertumbuhan, yaitu menjadi sebesar 2,33 persen pada tahun 2017 dan 7,03 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019, pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah kembali mengalami perlambatan menjadi sebesar 2,09 persen.

3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)³. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (enam) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2015 – 2019 relatif menurun dari 13,93 persen (2015) menjadi 3,40 persen (2019), sementara di tahun lainnya masing-masing 16,89 persen (2016); 6,16 persen (2017); dan 4,31 persen (2018).

Secara proporsi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku, terlihat bahwa kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Sumba Barat pada periode 2015-2019 juga berfluktuasi. Proporsinya pada tahun 2015 sebesar 31,36 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2017 menjadi masing-masing sebesar 37,96 persen dan 38,28 persen. Namun pada tahun 2018 dan 2019 kontribusi komponen ini mengalami penurunan menjadi masing-masing sebesar 37,69 dan 36,68 persen.

³ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

**Tabel 3.9 Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Sumba Barat
2015-2019**
*Table 3.9 Trend and Structure of GFCF, Sumba Barat Regency
2015 – 2019*

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	514.610,86	693.855,39	761.376,30	817.426,99	856.348,45
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	418.993,00	489.761,06	519.945,77	542.346,36	560.804,19
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	31,36	37,96	38,28	37,69	36,68
Pertumbuhan (ADHK 2010)	13,93	16,89	6,16	4,31	3,40

Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.6 Perkembangan Perubahan Inventori

Salah satu komponen penting dalam perekonomian adalah inventori atau persediaan. Perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **“persediaan”** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok). Dalam proses produksi, inventori dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi yang belum terjual. Dengan demikian, secara sederhana inventori menggambarkan input produksi yang belum digunakan dan output produksi yang belum terjual.

**Tabel 3.10 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Sumba Barat 2015-2019**
*Table 3.10 Trend and Structure of Changes in Inventories, Sumba Barat Regency
2015—2019*

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	75.924,99	30.625,59	36.812,03	44.837,68	52.253,56
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	45.200,27	17.534,32	20.281,68	23.693,03	27.084,06
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	4,63	1,68	1,85	2,07	2,24

Keterangan :

**) Angka Sementara*

****) Angka Sangat Sementara*

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2015 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sekitar 75 miliar rupiah, yang kemudian menurun pada tahun dan 2016 menjadi 30 miliar rupiah. Pada tahun 2017 perubahan inventori mencapai 36 miliar rupiah, tahun 2018 kembali meningkat menjadi 44 miliar rupiah dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 52 miliar rupiah.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Sumba Barat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, proporsi perubahan inventori adalah 4,63 persen, selanjutnya 1,68 persen (2016), 1,85 persen (2017), 2,07 persen (2018), dan 2,24 persen (2019).

3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Sumba Barat tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 3.11 Perkembangan Ekspor Kabupaten Sumba Barat 2015-2019
Table 3.11 Trend of Export, Sumba Barat Regency
2015—2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	327.218,00	149.167,98	151.562,56	185.814,92	180.789,52
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	238.789,86	98.068,65	98.144,61	112.472,11	108.981,12
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	19,94	8,16	7,62	8,57	7,74
Pertumbuhan (ADHK 2010)	42,72	-58,93	0,08	14,60	-3,10

Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Secara total, dalam kurun waktu 2015-2019 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan angka yang berfluktuasi. Pada tahun 2015 nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga berlaku sebesar 327 miliar rupiah menurun menjadi 149 miliar rupiah pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017-2019 nilai ekspor barang dan jasa menjadi sekitar 151 miliar rupiah; 185 miliar rupiah; dan 180 miliar rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan angka yang juga berfluktuasi, masing-masing sebesar 238 miliar rupiah (2015); 98 miliar rupiah (2016); 98 miliar rupiah (2017) 112 miliar rupiah (2018); dan 108 miliar rupiah (2019). Sementara itu, pada periode 2015 s.d 2019, proporsinya dalam PDRB juga berfluktuasi dari 19,94 persen pada tahun 2015 menjadi 7,74 persen di tahun 2019.

Pertumbuhan riil total ekspor pada periode 2015-2019 berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, komponen ekspor tumbuh sebesar 42,72 persen, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai minus 58,93 persen di tahun 2016. Sementara pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan ekspor pada masing-masing tahun adalah sebesar 0,08 persen (2017); 14,60 persen(2018); dan minus 3,10 persen (2019). Penurunan hingga mencapai pertumbuhan yang minus disebabkan oleh adanya penurunan volume ekspor dalam bentuk barang dan jasa.

3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Sumba Barat sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Sumba Barat di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Sumba Barat terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah Kabupaten Sumba Barat lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pada periode 2015 s.d 2019 secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Sumba Barat berfluktuasi (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010). Nilai total impor atas dasar harga berlaku pada tahun 2015-2019 berada pada rentang angka 1,32 triliun rupiah hingga mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 1,53 triliun pada tahun 2019. Proporsi komponen ini juga turut berfluktuasi, pada tahun 2015 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 83,70 persen. Pada tahun berikutnya kontribusi impor barang dan jasa menurun menjadi 72,29 persen dan 70,37 persen pada tahun 2016 dan tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2018 dan 2019 proporsi impor barang dan jasa masing-masing sebesar 70,22 persen, dan 65,79 persen.

Pertumbuhan riil total impor pada periode 2015-2019 juga berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015, komponen impor tumbuh sebesar 17,46 persen, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai minus 8,98 persen di tahun 2016. Sementara pada tahun-tahun

berikutnya pertumbuhan impor pada masing-masing tahun adalah sebesar 3,01 persen (2017); 6,09 persen (2018); dan 0,78 persen (2019).

Secara umum, nilai impor untuk barang dan jasa selama periode tahun 2015-2019 cenderung lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspornya. Hal ini dapat dipahami karena Kabupaten Sumba Barat masih sangat tergantung dengan keberadaan kabupaten lain bahkan provinsi lain, karena produksi barang dan jasa dari wilayah Sumba Barat sendiri belum mampu untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Adapun komoditas yang paling banyak diekspor adalah tanaman pangan dan peternakan, sedangkan komoditas yang paling banyak diimpor berasal dari industri makanan dan minuman.

Tabel 3.12 Perkembangan Impor Kabupaten Sumba Barat 2015-2019
Table 3.12 Trend of Import, Sumba Barat Regency 2015—2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.373.584,11	1.321.351,87	1.399.589,97	1.523.032,12	1.535.820,58
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.174.149,91	1.068.695,42	1.100.826,94	1.167.870,16	1.176.949,66
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	83,70	72,29	70,37	70,22	65,79
Pertumbuhan (ADHK 2010)	17,46	-8,98	3,01	6,09	0,78

Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

<https://sumbabaratkab.bps.go.id>

Bab IV
ANALISIS STRATEGIS
PDRB PENGELUARAN

<https://sumbabaratkab.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis strategis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB Nominal

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Sumba Barat, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita

**Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Sumba Barat 2015-2019**

**Table 4.1 Gross Domestic Regional Bruto and per capita GRDP, Sumba Barat Regency
2015—2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai PDRB (<i>Juta Rp</i>)					
- ADHB	1.641.001,71	1.827.798,88	1.988.825,40	2.168.879,69	2.334.460,55
- ADHK 2010	1.183.319,48	1.242.515,43	1.304.953,37	1.371.144,23	1.441.390,81
PDRB perkapita (<i>Juta Rp</i>)					
- ADHB	13,46	14,75	15,81	16,96	18,00
- ADHK 2010	9,71	10,03	10,38	10,72	11,11
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK 2010 (%)	3,07	3,31	3,47	3,35	3,63
Jumlah penduduk	121.921	123.913	125.776	127.872	129.710
Pertumbuhan (%)	1,68	1,63	1,50	1,67	1,44

4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.2 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Sumba Barat 2015-2019
Table 4.2 Total Proporsion of Final Consumption Expenditure to GRDP Sumba Barat Regency 2015—2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Juta Rp)					
a. Rumah tangga	1.342.725,32	1.463.525,12	1.569.743,55	1.657.668,48	1.760.927,83
b. LNPRT	53.742,87	56.500,46	62.549,29	70.014,11	76.915,32
c. Pemerintah	700.363,78	755.476,22	806.371,63	916.149,62	943.046,45
Jumlah	2.096.831,97	2.096.831,97	2.096.831,97	2.096.831,97	2.096.831,97
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	1.641.001,71	1.827.798,88	1.988.825,40	2.168.879,69	2.334.460,55
Proporsi	127,78	124,49	122,62	121,90	119,12

Proporsi total pengeluaran konsumsi akhir yang meliputi konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah menunjukkan angka diatas 100 persen. Pada tahun 2019, proporsi total pengeluaran konsumsi akhir adalah sebesar 119,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan konsumsi akhir baik oleh rumah tangga, lembaga non profit melayani rumah tangga, maupun pemerintah, tidak dapat disediakan oleh produsen lokal sepenuhnya. Proporsi konsumsi final terhadap PDRB yang semakin menurun dalam 5 tahun terakhir menggambarkan penurunan ketergantungan terhadap barang dan jasa impor dari tahun ke tahun. Semakin meningkatnya sektor industri dan jasa lokal tentunya sangat mendorong kecukupan penyediaan konsumsi akhir bagi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah.

4.3 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Parameter ini dapat digunakan sebagai proksi besaran dampak peningkatan investasi di Sumba Barat terhadap perekonomiannya atau membantu pemerintah dalam merencanakan target investasi yang masuk untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu.

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang diproduksi oleh manusia baik berupa bangunan maupun non bangunan, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 4.3 Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Sumba Barat
2015-2019**

**Table 4.3 Incremental Capital Output Ratio, Sumba Barat Regency
2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Juta rupiah)	1.183.319,48	1.242.515,43	1.304.953,37	1.371.144,23	1.441.390,81
Perubahan (Juta rupiah)	54.221,32	59.195,95	62.437,93	66.190,87	70.246,57
PMTB (ADHK 2010) (Juta Rp)	418.993,00	489.761,06	519.945,77	542.346,36	560.804,19
ICOR	7,73	8,27	8,33	8,19	7,98

Nilai ICOR pada tabel di atas menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output. Besaran ICOR pada tahun 2019 adalah sebesar 7,98, artinya setiap pertambahan satu unit nilai output di tahun 2019, membutuhkan penambahan kapital sekitar 8 unit.

Bab V

PENUTUP

<https://sumbabaratkab.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2015 s.d 2019 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Sumba Tengah pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Tinjauan perekonomian Sumba Barat menurut PDRB Pengeluaran menggambarkan bahwa perekonomian Sumba Barat selama lima tahun terakhir terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi Sumba Barat tahun 2019 merupakan yang tercepat dalam lima tahun terakhir. Konsumsi akhir khususnya konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian.
3. Analisis strategis PDRB Pengeluaran kabupaten Sumba Barat menggambarkan kontribusi ekonomi per kapita terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Selain itu, selama lima tahun terakhir juga faktor produksi lokal semakin optimal dalam memenuhi konsumsi akhir rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah.
4. Invenstasi menjadi bagian penting dalam mendorong perekonomian kabupaten Sumba Barat. Kontribusi Investasi dalam perekonomian Sumba Barat merupakan yang tertinggi setelah konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi pemerintah. Peningkatan investasi baik berupa bangunan maupun non bangunan akan terus meningkatkan koefisien dampaknya terhadap perekonomian Sumba Barat.

Lampiran

<https://sumbabaratkab.bps.go.id>

LAMPIRAN 1.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SUMBA BARAT
MENURUT PENGELUARAN
ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2015-2019

(Juta Rp.)

Komponen		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.342.725,32	1.463.525,12	1.569.743,55	1.657.668,48	1.760.927,83
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	53.742,87	56.500,46	62.549,29	70.014,11	76.915,32
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	700.363,78	755.476,22	806.371,63	916.149,62	943.046,45
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	514.610,86	693.855,39	761.376,30	817.426,99	856.348,45
5	Perubahan Inventori	75.924,99	30.625,59	36.812,03	44.837,68	52.253,56
6	Ekspor	327.218,00	149.167,98	151.562,56	185.814,92	180.789,52
7	Impor	1.373.584,11	1.321.351,87	1.399.589,97	1.523.032,12	1.535.820,58
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		1.641.001,71	1.827.798,88	1.988.825,40	2.168.879,69	2.334.460,55

Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

LAMPIRAN 2.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SUMBA BARAT
MENURUT PENGELUARAN
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010=100
TAHUN 2015-2019

(Juta Rp.)

Komponen		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.052.776,88	1.102.278,77	1.147.921,34	1.196.624,32	1.241.476,70
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	44.333,39	44.712,01	47.597,94	51.760,07	55.082,00
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	557.376,00	558.856,03	571.888,96	612.118,50	624.912,40
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	418.993,00	489.761,06	519.945,77	542.346,36	560.804,19
5	Perubahan Inventori	45.200,27	17.534,32	20.281,68	23.693,03	27.084,06
6	Ekspor	238.789,86	98.068,65	98.144,61	112.472,11	108.981,12
7	Impor	1.174.149,91	1.068.695,42	1.100.826,94	1.167.870,16	1.176.949,66
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		1.183.319,48	1.242.515,43	1.304.953,37	1.371.144,23	1.441.390,81

Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

LAMPIRAN 3.
DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SUMBA BARAT MENURUT PENGELUARAN
ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2015-2019

(Persen)

Komponen		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	81,82	80,07	78,93	76,43	75,43
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,28	3,09	3,15	3,23	3,29
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	42,68	41,33	40,55	42,24	40,40
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,36	37,96	38,28	37,69	36,68
5	Perubahan Inventori	4,63	1,68	1,85	2,07	2,24
6	Ekspor	19,94	8,16	7,62	8,57	7,74
7	Impor	83,70	72,29	70,37	70,22	65,79
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

LAMPIRAN 4.
DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SUMBA BARAT MENURUT PENGELUARAN
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010=100
TAHUN 2015-2019

(Persen)

Komponen		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	88,97	88,71	87,97	87,27	86,13
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,75	3,60	3,65	3,77	3,82
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	47,10	44,98	43,82	44,64	43,35
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	35,41	39,42	39,84	39,55	38,91
5	Perubahan Inventori	3,82	1,41	1,55	1,73	1,88
6	Ekspor	20,18	7,89	7,52	8,20	7,56
7	Impor	99,23	86,01	84,36	85,17	81,65
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

LAMPIRAN 5.
LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SUMBA BARAT MENURUT PENGELUARAN
ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2015-2019

(Persen)

Komponen		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12,30	9,00	7,26	5,60	6,23
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,28	5,13	10,71	11,93	9,86
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,20	7,87	6,74	13,61	2,94
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	17,49	34,83	9,73	7,36	4,76
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Ekspor	53,25	-54,41	1,61	22,60	-2,70
7	Impor	24,18	-3,80	5,92	8,82	0,84
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		11,77	11,38	8,81	9,05	7,63

Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

LAMPIRAN 6.
LAJU PERUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SUMBA BARAT MENURUT PENGELUARAN
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010=100
TAHUN 2015-2019

(Persen)

Komponen		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,13	4,70	4,14	4,24	3,75
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,49	0,85	6,45	8,74	6,42
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,35	0,27	2,33	7,03	2,09
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	13,93	16,89	6,16	4,31	3,40
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Ekspor	42,72	-58,93	0,08	14,60	-3,10
7	Impor	17,46	-8,98	3,01	6,09	0,78
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		4,80	5,00	5,03	5,07	5,12

Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

LAMPIRAN 7.
INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SUMBA BARAT MENURUT PENGELUARAN
(2010=100) TAHUN 2015-2019

Komponen		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	127,54	132,77	136,75	138,53	141,84
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	121,22	126,37	131,41	135,27	139,64
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	125,65	135,18	141,00	149,67	150,91
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	122,82	141,67	146,43	150,72	152,70
5	Perubahan Inventori	167,97	174,66	181,50	189,24	192,93
6	Ekspor	137,03	152,11	154,43	165,21	165,89
7	Impor	116,99	123,64	127,14	130,41	130,49
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		138,68	147,10	152,41	158,18	161,96

Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

LAMPIRAN 8.
LAJU PERTUMBUHAN INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SUMBA BARAT MENURUT PENGELUARAN
TAHUN 2015-2019

(Persen)

Komponen		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,81	4,10	2,99	1,30	2,39
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,54	4,24	3,99	2,93	3,23
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,32	7,58	4,30	6,15	0,83
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,12	15,35	3,36	2,93	1,31
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Ekspor	7,38	11,00	1,53	6,98	0,41
7	Impor	5,72	5,69	2,83	2,57	0,06
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		6,65	6,08	3,60	3,79	2,39

Keterangan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sumbabarat.bps.go.id>

ISBN 978-602-6597-87-8



BPS Kabupaten Sumba Barat

Jl. Wee Karou Waikabubak - Sumba Barat

Nusa Tenggara Timur 87000

Telp/Fax. (0837) 21256 Email: bps5301@bps.go.id